



KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

LAPORAN KINERJA

2024

Jl. Poros Mesjid Agung, Komplek Natuna Gerbang
Utaraku-Provinsi Kepulauan Riau
Email : @kecbungtim.natunakab.go.id
Website : kecbungtim.natunakab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Kecamatan Bunguran Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Gambaran tentang capaian kinerjanya selama Tahun 2024 yang mengacu pada RENSTRA tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 yang tertuang dalam laporan kinerja Kecamatan Bunguran Timur sesuai dengan rencana kerja tahun 2024 Kecamatan Bunguran Timur telah menetapkan 6 (Enam) Program sarana strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan. Seluruh Sub kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2024, ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan mencapai 85,33%, belum maksimalnya tingkat capaian tersebut dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran atau penghematan dan penyesuaian kondisi kegiatan dilapangan serta ada nya keterlambatan transfer dana dari pusat.

Kecamatan Bunguran Timur dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki peluang sehingga berupaya meningkatkan kinerjanya yang maksimal. Hasil capaian kinerja diatas, baik yang telah mencapai 100% maupun yang belum mencapai 100%, lebih memotivasi Kecamatan Bunguran Timur untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan membangun daerah Kabupaten Natuna, khususnya dibidang pelayanan publik.

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Bunguran Timur memiliki 6 (Enam) Program sarana strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan dianggarkan dari Alokasi Dana APBD sebesar **Rp. 13.293.001.318,00**. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 11.342.613.235,00** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **85.33 %**, dari anggaran pembiayaan tersebut maka perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur di ukur berdasarkan tingkat pencapaian

Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian sasaran kerja pada Kecamatan Bunguran Timur yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kita aturkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas izinnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) ini merupakan upaya pedoman perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna selama tahun anggaran 2024.

Dalam penyusunan LKjIP ini kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) ini kami susun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Ranai, 20 Januari 2025

Pt. CAMAT BUNGURAN TIMUR



HARMIDI, S.A.P
Penata Tk. I/III/d

NIP. 19740101 199803 1 008

DAFTAR ISI

ISI	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Bunguran Timur	3
1.5 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian	6
1.6 Sistematika Penyusunan	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 11
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2021-2026	11
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	14
2.1.3 Indikator Kinerja Utama	15
2.2 Rencana Kinerja Bunguran Timur Tahun 2024	16
2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 22
3.1 Pengukuran Kinerja	22
3.2 Analisa Kinerja.....	24
3.3 Analisis Keuangan.....	31
 BAB IV PENUTUP	 34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Rekomendasi.....	35
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Luas Wilayah Kecamatan	4
Tabel 1.4.2	Jumlah Penduduk.....	5
Tabel 1.5.1	Nama-nama Pejabat Kecamatan	7
Tabel 1.5.2	Nama-nama Lurah dan Kepala Desa	8
Tabel 1.5.3	Jumlah PNS dan PTT	8
Tabel 2.1.2.1	Tujuan, sasaran, dan Indikator Sasaran 2022-2026	14
Tabel 2.1.3.1	Indikator Kinerja Utama 2024	15
Tabel 2.3.1	Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	16
Tabel 2.3.2	Program dan kegiatan yang mendukung IKU	17
Tabel 2.3.3	Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung IKU	19
Tabel 3.1.1	Skala Penilaian	23
Tabel 3.2.1	Jumlah Layanan Kecamatan	27
Tabel 3.2.2	Survey Kepuasan Masyarakat	27
Tabel 3.2.3	Capaian Indikator Kinerja IKM	28
Tabel 3.2.4	Nilai Unsur Survey Kepuasan Masyarakat	28
Tabel 3.2.5	Perbandingan IKM Tahun sebelumnya.....	30
Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Pelayanan.....	30
Tabel 3.5	Analisis Keuangan.....	31

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.5.1	Struktur Organisasi Kecamatan	6
--------------------	-------------------------------------	---

DAFTAR BAGAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat SM I Tahun 2024
4. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat SM II Tahun 2024
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Cascading Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024
7. Crosscutting Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong (motivator) agar terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik sebagai media perbaikan pelaksanaan Pemerintahan ke depan dan Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bunguran Timur berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKJIIP) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna adalah dalam rangka melaksanakan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta sebagai media pertanggungjawaban Kepada lembaga Legislatif dan publik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKJIIP) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 adalah:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024 kepada Bupati Natuna.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Unit kerja untuk Meningkatkan kinerja Kecamatan Bunguran Timur.

3. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Natuna.

Dari tiga fungsi utama Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur tersebut merupakan cerminan dari **maksud dan tujuan** dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur tahun 2024.

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Bunguran Timur

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting, karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapn kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kecamatan Bunguran Timur merupakan salah satu kecamatan induk yang ada di Kabupaten Natuna dengan 6 wilayah administratif yang terdiri dari 4 Kelurahan dan 3 Desa. Kecamatan Bunguran Timur berbatasan dengan

Kecamatan Bunguran Timur Laut disebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Selatan disebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Natuna disebelah Timur dan berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamatan Bunguran Barat disebelah barat. Secara geografis, Kecamatan Bunguran Timur berada di titik koordinat 03°46'50" – 03°59'56" LU (Lintang Utara) dan 108°12'20" – 108°24'14' BT (Bujur Timur), dengan luas daratan 213,52 Km². Karakteristik daratan dan pesisir yaitu perbukitan dan bebatuan.

Kecamatan Bunguran Timur berkedudukan di Pulau Bunguran Besar dengan pusat pemerintahannya terletak di Jln. Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku Kecamatan Bunguran Timur dengan ibukota kecamatan terletak di Ranai Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, dengan luas wilayah Kecamatan Bunguran Timur ± 213,52 KM² terbagi ke dalam 4 Kelurahan dan 3 Desa dapat dilihat pada table 1.1 berikut :

Tabel 1.4.1
Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Luas Wilayah Kelurahan dan Desa Kecamatan Bunguran Timur, 2024

Kelurahan/Des a	Luas Wilayah Daratam (Km ²)
1	2
Kelurahan Ranai Kota	3,30
Kelurahan Bandarsyah	14,11
Kelurahan Ranai Darat	13,84
Kelurahan Batu Hitam	6,83
Desa Sungai Ulu	67,70
Desa Batu Gajah	51,02
Desa Sepempang	56,72

Sumber Data : Profil Kecamatan Bunguran Timur 2024

Penduduk di Kecamatan Bunguran Timur berjumlah 28.286 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 14.328 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 13.958 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 9.874 Kepala Keluarga.

Untuk sebaran penduduk Kecamatan Bunguran Timur dapat dilihat pada table 1.4.2 berikut :

Tabel 1.4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kecamatan Bunguran Timur, 2024

Kelurahan/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Kelurahan Ranai Kota	3.950	3.865	7.815
Kelurahan Bandarsyah	3.014	2.897	5.911
Kelurahan Ranai Darat	1.845	1.804	3.649
Kelurahan Batu Hitam	2.750	2.712	5.462
Desa Sungai Ulu	1.054	995	2.049
Desa Batu Gajah	703	698	1.401
Desa Sepempang	1.012	987	1.999
Jumlah	14.328	13.958	28.286

Sumber Data : Profil Kecamatan Bunguran Timur 2024

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa factor yang bisa menjadi potensi/keunggulan yang apabila dikembangkan akan menguatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Bunguran Timur antara lain :

- a. Perikanan dan Kelautan yaitu usaha perikanan laut (keramba jaring tancap maupun bagan terapung) dan rumput laut serta budidaya ikan air tawar.
- b. Pertanian dan Perkebunan (kelapa, karet, cengkeh, pinang)
- c. Pariwisata (wisata pantai, wisata alam pegunungan dan wisata laut).
- d. Pertambangan/galian (batu dan pasir)

Permasalahan yang dihadapi kecamatan Bunguran Timur dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan (kesempatan kerja)
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian
- c. Penangkapan Ikan masih menggunakan peralatan tradisional
- d. Tingginya angka stunting
- e. Tingginya angka pertambahan jumlah penduduk tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai
- f. Rendahnya kesempatan kerja
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana jasa komunikasi

- h. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan;
- i. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintah Kecamatan Bunguran Timur.

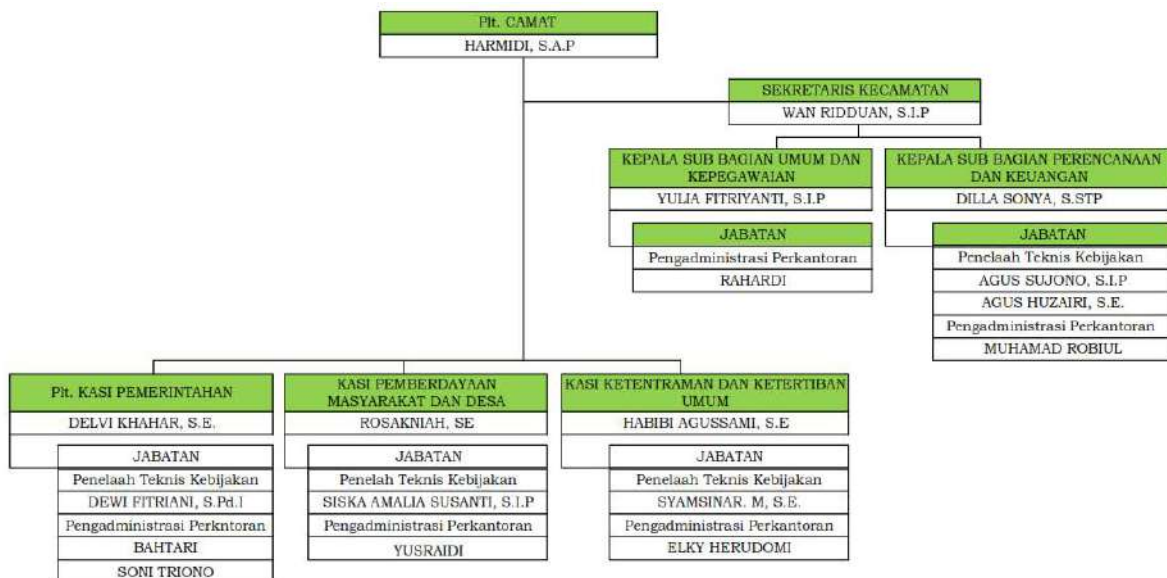
1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun susunan organisasi Kantor Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bagan 1.5.1

Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2024

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Bunguran Timur membawahi pemerintahan Kelurahan dan Desa dimana Pemerintah Kelurahan dan Desa merupakan Struktur Pemerintahan tingkat terkecil Daerah yang mana Kepala Pemerintahan Kelurahan dan Desa bertanggung jawab kepada Camat sebagai atasan langsung. Kecamatan Bunguran Timur terdiri dari 3 Desa (Desa Sungai Ulu, Desa Sepempang dan Desa Batu Gajah) dan 4 Kelurahan (Kelurahan Ranai Kota, Kelurahan Bandarsyah, Kelurahan Batu Hitam dan Kelurahan Ranai Darat) dengan 17 dusun / lingkungan, 119 RT dan 34 RW.

Selanjutnya sebagai partisipasi aktif dari masyarakat guna mendukung jalannya pemerintahan ditingkat Kelurahan dan Desa maka dibentuklah RT dan RW sesuai dengan Permendagri Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Maka Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang dibina oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dengan operasional yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan pemerintahan setempat dan tidak tertutup kemungkinan masing-masing wilayah atau daerah tertentu mempunyai tatacara yang berbeda baik nama atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai organisasi kemasyarakatan. Dewasa ini peranserta perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sangat penting karena langsung bersentuhan dengan masyarakat karena, selain menjadi perangkat terkecil dari Pemerintah

Tabel 1.5.1

Nama-nama Pejabat Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur, 2024

Jabatan	Nama Pejabat
1	2
Ptl. Camat	Harmidi, S.A.P
Sekretaris Kecamatan	Wan Ridduan, S.IP
Plt. Kasi Pemerintahan	Delvi Khahar, S.I.P
Kasi PMD	Rosakniah, S.IP
Kasi Trantibum	Habibi Agussami, S.E
Kasuubbag Perencanaan dan Keuangan	Dilla Sonya, S.STP
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Yulia Fitriyanti, S.IP

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2024

Tabel 1.5.2**Nama-nama Lurah dan Kepala Desa Kecamatan Bunguran Timur, 2024**

Jabatan	Nama Pejabat
1	2
Lurah Ranai Kota	Wan Ariansyah, SE
Plt. Lurah Ranai Darat	Supriyadi, S.I.P
Lurah Bandarsyah	Sudirman, S.IP
Lurah Batu Hitam	Hendrizan, S.E
Kepala Desa Sungai Ulu	Supriyanto
Kepala Desa Batu Gajah	Kurniawan Sidro Utomo
Kepala Desa Sepempang	Muhammad Sholihin

Sumber Data : Seksi PMD, 2024

Tabel 1.5.3**Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PTT dikantor Kecamatan Bunguran Timur, Kelurahan dan Desa Kecamatan Bunguran Timur, 2024**

Kantor	PNS	PTT	Tenaga Kontrak	Perangkat Desa
1	2	3	4	5
Kecamatan Bunguran Timur	16	4	4	-
Kelurahan Ranai Kota	8	4	3	-
Kelurahan Ranai Darat	10	7	2	-
Kelurahan Bandarsyah	8	4	2	-
Kelurahan tu Hitam	8	4	5	-
Desa Sepempang		-		12
Desa Sungai Ulu	-	-		11
Desa Batu Gajah	-	-		16
Jumlah	47	23	16	39

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2024

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Kecamatan Bunguran Timur
- 1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1. Rencana Stratesgi Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2021-2026
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024
- 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oraganisasi dan realisasi anggaran.

- 3.1. Pengukuran Kinerja

3.2. Analisis Kinerja

3.3. Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
5. Cascading Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024
6. Crosscutting Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakneses*), Peluang (*opportunities*) dan tantangan / Kendala (*threats*) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD.

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan nilai Religius dan Kultural”

Penjabaran Visi Kaupaten Natuna Peroide 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut :

✓ ***Maritim Yang Unggul***

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna diwujudkan sebagai poros arus aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim.

✓ ***Eksotis***

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah didalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Petensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

✓ ***Aman***

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan meruapan wilayah yang rawan dan Pemerintah Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah indonesi.

✓ ***Kemandirian Ekonomi***

Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya. Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

✓ ***Religius***

Religious adalan peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religious yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antara uat beragama.

✓ **Kultural**

Kultural adalah kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut nasionalisme dan kebhinekaan.

Misi Kabupaten Natuna 2021-2026 yaitu :

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy);
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 maka Kecamatan Bunguran Timur mendukung misi ke 6 (enam) yaitu **"Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy)"**. Kecamatan Bunguran Timur memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Bunguran Timur. Rumusan Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 yaitu “**Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima**”.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terstruktur yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bunguran Timur. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Bunguran Timur dalam periode pembangunan 2024, yaitu “**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**”.

Tabel 2.1.2.1

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pengamalan Agama	Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	0	70	70	80	80	90	90
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	0	70	75	80	85	90	90

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	72.34	79.90	79.95	80.00	80.00	80.00	80,00
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.48	3.49	3.50	3.51	3.52	3.53	3.53

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Timur merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusiness) yang diemban.

Kecamatan Bunguran Timur telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ket.
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.51	IKM

2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Timur telah menetapkan 6 (Enam) Program sasaran strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan dianggarkan dari Alokasi Dana APBD sebesar ***Rp. 13.293.001.318,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).***

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Camat Bunguran Timur menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Renstra Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Secara ringkas Perjanjian Kinerja tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 yang mendukung kinerja utama sebagai berikut

Tabel. 2.3.1

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.51

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	9.646.713.792,00
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	219.180.000,00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	3.156.125.296,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	126.066.540,00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	43.919.550,00
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	82.996.140,00
Jumlah	Rp.	13.273.001.318,00

Ranai, 20 September 2024

Plt. Camat Bunguran Timur


Bupati Natuna,
WAN S. SWANDI, S.Sos, M.Si


PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
NATUNA
HARMIDI S.A.P
NIP. 19740101 199803 1 008

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 dengan Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang mempunyai target indeks sebesar 3,51. Anggaran Kecamatan Bunguran Timur setelah Perubahan bertambah menjadi **Rp. 13.273.001.318,00**.

Dalam mendukung Perjanjian Kinerja Kecamatan Bunguran Timur, maka Pemerintah Kecamatan akan menentukan Program dan Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur. Program dan Kegiatan tersebut dituangkan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.3.2

**Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bunguran Timur Tahun
2024**

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.51
	1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat ✓ Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Dokumen
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Perencanaan, Penguasaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Administrasi Kepegawaian ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan • Administrasi Umum Perangkat Daerah ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		3 Dokumen 54 Pegawai 1 Paket 10 Orang 12 Paket 12 Paket 12 Paket

	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ✓ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		3 Desa 4 Kelurahan
--	--	--	--------------------

Agar tercapainya Sasaran Indikator Kinerja Utama maka telah ditetapkan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bunguran Timur yang diprioritaskan mendukung Sasaran IKU tersebut. Setiap Program dan Kegiatan untuk mendukung IKU telah di tetapkan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung IKU

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target	Ket
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.51	
	1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat ✓ Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Rp 219.180.000,00	
	2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Administrasi Kepegawaian ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan • Administrasi Umum Perangkat Daerah ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan ✓ Penyediaan Bahan/Material		Rp. 24.581.000,00 Rp. 6.865.092.772,00 Rp. 42.500.000,00 Rp. 84.000.000,00 Rp. 52.500.000,00 Rp. 238.720.000,00 Rp. 40.595.000,00 Rp. 75.600.000,00	

	✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ✓ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ✓ Pengadaan Mebel ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya ✓ Pengadaan Aset Tetap Lainnya • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp. 241.800.000,00 Rp. 281.300.000,00 Rp. 69.751.000,00 Rp. 544.657.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 31.158.000,00 Rp. 104.531.300,00 Rp.744.862.400,00 Rp. 100.355.320,00 Rp. 18.110.000,00 Rp. 36.600.000,00	
	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Daerah yang ada di Kecamatan ✓ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp. 76.501.916,00	
	4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ✓ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Rp. 124.065.916,00	
	5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah ✓ Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Rp. 43.919.550,00	

	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ✓ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Rp. 82.996.140,00	
--	---	--	-------------------	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran . hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna .

Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Timur tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur yang telah dicapai.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* dengan realisasi kinerja Aktual Tahun 2022 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja mencakup beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau Standard Pelayanan Minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing OPD, data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh

data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel 3.1.1
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna di sajikan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Timur tahun 2021–2026.

3.2. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Misi 6 : Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy).

Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Sasaran RPJMD menjadi Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Untuk mencapai Tujuan tersebut maka harus ditetapkan sasaran yang tepat untuk mencapai Tujuan Rencana Strategis Kecamatan. Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan

- Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima.

Sasaran

- Meningkatnya kepuasan Masyarakat.

Untuk Memenuhi Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bunguran Timur, maka didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - ✓ Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyediaan Bahan/Material
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pengadaan Mebel
 - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
 - ✓ Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - ✓ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - ✓ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - ✓ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - ✓ Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bunguran Timur, dimana ada layanan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat nomor 41 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan. Layanan yang dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Jumlah Layanan Kecamatan
Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Pengelola layanan	Jumlah
1	Rekom BBM	Kasi Pemerintahan	195
2	Desfensasi Nikah	Kasi Pemerintahan	42
3	Susunan Keluarga	Kasi Pemerintahan	18
4	Kartu Berobat	Kasi Pemerintahan	45
5	Surat Rekomendasi Reklame	Kasi Pemerintahan	10
6	Rekom Proposal	Kasi Pemerintahan	15
7	Surat Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	52
8	Surat Keterangan	Kasi Pemerintahan	10

Seksi Pemerintahan Kec. Bunguran Timur Tahun 2024

Dari jumlah layanan yang diberikan telah dilakukan survey kepada pengguna layanan selama tahun 2024 pada periode semester I dan semester II sebagaimana dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.2.2
Survey Kepuasan Masyarakat
Tahun 2024

Periode survey	Jumlah responden	Nilai IKM
Semester I	50	3,69
Semester II	50	3,76
Rata-rata nilai IKM Kec. Bunguran Timur	100	3.73

Seksi Pemerintahan Kec. Bunguran Timur Tahun 2024

Tabel 3.2.3
Capaian Indikator Kinerja IKM

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.51	3.73	106,27%

Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat dengan target 3.51 dengan Realisasi mencapai 3.73 dengan persentase capaian sebesar **106,27 %** (persen). Hasil IKM diukur dari survey yang dilakukan pada tahun 2024 dengan masa survey dibagi menjadi 2 semester dengan jumlah responden sebanyak 50 orang yang menerima pelayanan di kantor Kecamatan dengan mencakup 9 unsur pelayanan untuk menjadi tolak ukur penilaian. Adapun hasil survey per unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Nilai Unsur Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur SKM	NRR	
		SM I	SM II
1	2	3	4
1.	Persyaratan Pelayanan	3,480	3,691
2.	Prosedur Pelayanan	3,760	3,855
3.	Waktu Pelayanan	3,620	3,636
4.	Biaya / Tarif pelayanan	3,960	3,909
5.	Produk Pelayanan	3,800	3,891
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,760	3,873
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3,780	3,873
8.	Sarana dan Prasarana	3,480	3,636
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3,920	3,836
	NRR Tertimbang	3,692	3,762
	Nilai IKM	92,290 (Sangat Baik)	94,050 (Sangat Baik)

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024

Dari 9 Unsur pelayanan yang ada, terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki NRR SKM yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan Bunguran Timur yaitu unsur waktu pelayanan, kompetensi petugas dan sarana dan prasarana dikarenakan mendapat nilai terendah dari unsur yang lain. Nilai Unsur tersebut adalah :

Untuk meningkatkan tiga unsur pelayanan tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur menindaklanjuti hasil survey dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Perlu upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan tersebut harus tertuju kepada pengguna layanan dengan melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan yang ada.
- c. Mengevaluasi prosedur dan kecepatan pelayanan, agar lebih mudah, cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan kualitas produk pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati kemudahan untuk menggunakan produk layanan yang berkualitas.
- e. Meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab petugas layanan melalui pelatihan secara periodic, antara lain menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan menerapkan *reward* dan *punishment*.
- f. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan profesionalitas petugas layanan melalui pelatihan antara lain *character building*.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat maka didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Table 3.2.5
Perbandingan IKM Tahun sebelumnya

No	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.50	3,69	105,43%	3.51	3,73	106,27

Target pada tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023 dengan pencapaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 sebesar **3,73** dengan persentase capaian sebesar **106,27 %**. Hal ini menjadi catatan penting dalam peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Timur

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir RENSTRA (2026)	Target		Realisasi		Capaian	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79,87	80	79,90	79,95	72,34	65,65	90,54	82,11
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	90	80	85	80	85	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	0	100	100	100	85	90	85	90,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Persen	0	100	100	100	80	95	80	95,00

Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pesentase pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	100	100	100	80	80	80	80,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100,00

3.3. Analisis Keuangan

Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur pada Tahun 2022 telah menjalankan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama. Anggaran belanja dan realisasi belanja yang telah digunakan pada Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Analisis Keuangan

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.51		
	1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat ✓ Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Rp 219.180.000,00	Rp. 206.054.338,00	94.01
	2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Perencanaan, Penguasaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Administrasi Kepegawaian ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp. 24.581.000,00 Rp. 6.865.092.772,00 Rp. 42.500.000,00 Rp. 84.000.000,00	Rp. 13.080.072,00 Rp. 6.327.276.171,00 Rp. 17.831.672,00 Rp. 60.837.268,00	53.21 92.17 41.96 72.43

	• Administrasi Umum Perangkat Daerah ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan ✓ Penyediaan Bahan/Material ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ✓ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ✓ Pengadaan Mebel ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya ✓ Pengadaan Aset Tetap Lainnya • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp. 52.500.000,00 Rp. 238.720.000,00 Rp. 40.595.000,00 Rp. 75.600.000,00 Rp. 241.800.000,00 Rp. 281.300.000,00 Rp. 69.751.000,00 Rp. 544.657.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 31.158.000,00 Rp. 104.531.300,00 Rp. 744.862.400,00 Rp. 100.355.320,00 Rp. 18.110.000,00 Rp. 36.600.000,00	Rp. 46.714.850,00 Rp. 170.271.000,00 Rp. 14.991.900,00 Rp. 36.887.536,00 Rp. 95.020.592,00 Rp. 249.220.000,00 Rp. - Rp. 309.180.375,00 Rp. 48.430.000,00 Rp. 29.739.250,00 Rp. 32.724.917,00 Rp. 709.519.499,00 Rp. 62.689.443,00 Rp. 13.150.000,00	88.98 71.33 36.93 48.79 39.30 88.60 0 56.77 96.86 95.45 31.31 95.26 62.47 72.61
	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Daerah yang ada di Kecamatan ✓ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp. 3.176.125.296,00	Rp. 2.686.276.349,00	84.58
	4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ✓ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Rp. 124.065.916,00	Rp. 87.566.964,00	70.58
	5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				

	✓ Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Rp. 43.919.550,00	Rp. 31.400.600,00	71.50
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ✓ Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Rp. 82.996.140,00	Rp. 57.216.069,00	68.94
JUMLAH			Rp. 13.293.001.318,00	Rp. 11.342.613.235,00	85.33

Dalam hal penyerapan anggaran dalam Menunjang Indikator Kinerja Utama dari Anggaran ***Rp. 13.393.001.318,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah)***. Terealisasi sekitar ***Rp. 11.342.613.235,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)*** dengan persentase **85.33 %**. Jika dibandingkan dengan persentase serapan anggaran tahun 2023 yang mencapai **95.79 %** dapat dinyatakan bahwa terdapat penurunan serapan anggaran dikarenakan berbagai factor penghambat yaitu diantara terlambatnya dana transfer dari pusat kedaerah yang mengakibatkan tidak dapat dibayarkannya beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga berdampak dilaksanakannya rewiu hutang beban belanja SKPD sehingga jika dilihat dari persentase beberapa sub kegiatan belum maksimal. Selain itu juga diperlukan kemampuan dari masing-masing pegawai alam hal meningkatkan Pelayanan di Kecamatan agar penyerapan anggaran yang tepat sasaran.

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Timur dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Bunguran Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata pada Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (93,17%) atau mendapat predikat sangat baik
- b. Pelaksanaan sasaran strategis Kecamatan Limbangan didukung 6 (Enam) Program sasaran strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran **Rp. 13.393.001.318,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah)**. Terealisasikan sekitar **Rp. 11.342.613.235,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)** dengan persentase **85.33 %**. realisasi anggaran 85,33%

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kedepan. Meskipun terdapat Indikator Kinerja telah mencapai target maupun yang belum mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen lingkungan Pemerintahan Kecamatan Bunguran Timur untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang ada.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dan masyarakat.
5. Melakukan perbaikan atas review oleh inspektorat terhadap 4 komponen evaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi AKIP) dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bunguran Timur Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas Camat Bunguran Timur kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dimasa mendatang.

Bunguran Timur, 20 Januari 2025
Plt. CAMAT BUNGURAN TIMUR



HARMIDI. S.A.P
NIP. 19740101 199803 1 008

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HAMID HASNAN, Spd, MA**
Jabatan : **CAMAT BUNGURAN TIMUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

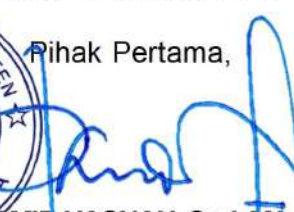
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Ranai, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

HAMID HASNAN, Spd, MA
NIP. 19660603 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.51

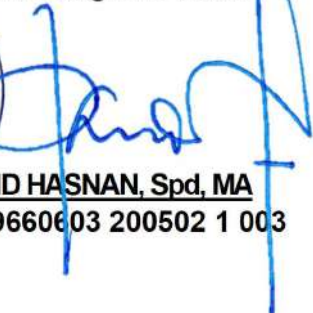
Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.942.006.360,00
2. PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 228.900.636,00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 2.830.855.296,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 101.016.540,00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 43.919.550,00
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp. 74.246.140,00
Jumlah	Rp. 11.220.944.522,00

Ranai, 08 Januari 2024


Bupati Natuna,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


Camat Bunguran Timur

HAMID HASNAN, Spd, MA
NIP. 19660603 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HARMIDI, S.A.P.**
Jabatan : **PLT. CAMAT BUNGURAN TIMUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 11.220.944.522,00 (Sebelas milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh dua rupiah) menjadi Rp. 13.273.001.318,00 (Tiga belas ,milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seribu tiga ratus delapan belas rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Ranai, 20 September 2024

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

HARMIDI, S.A.P.
NIP. 197401011998031008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.50

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	9.646.713.792,00
2. PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		219.180.000,00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	3.156.125.296,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	124.066.540,00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	43.919.550,00
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp.	82.996.140,00
Jumlah	Rp.	13.273.001.318,00

Ranai, 20 September 2024

Plt. Camat Bunguran Timur


Bupati Natuna,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si




HARMIDI, S.A.P.
NIP. 197401011998031008

**PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN : Kantor Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna
ALAMAT : Jl. Poros Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku - Provinsi Kepulauan Riau

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN									
RESP										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
3	4	4	4	4	4	3	4	2	4	
4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
5	3	3	3	4	3	3	3	2	4	
6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
7	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	3	3	2	4	4	4	4	2	4	
9	2	4	3	4	3	4	4	4	4	
10	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
11	3	4	4	4	4	3	4	3	3	
12	3	3	4	4	4	4	3	3	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	3	4	4	4	4	3	3	3	4	
15	4	3	4	4	3	4	4	3	4	
16	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	3	4	3	4	4	3	4	4	4	
20	3	3	3	4	4	4	3	3	4	
21	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
22	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
23	3	3	3	4	3	4	3	4	4	
24	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
25	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
26	3	4	4	4	4	3	4	4	3	
27	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
29	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
30	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	3	4	3	4	3	3	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
37	4	3	4	3	4	4	4	3	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
39	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
41	4	4	4	4	4	3	4	4	4	

42	3	4	3	4	4	4	3	3	4	
43	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
45	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	3	4	3	4	3	4	3	3	4	
50	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
SNilai /Unsur	174	188	181	198	190	188	189	174	196	
NRR / Unsur	3,480	3,760	3,620	3,960	3,800	3,760	3,780	3,480	3,920	
NRR tertbg/ unsur	0,383	0,414	0,398	0,436	0,418	0,414	0,416	0,383	0,431	*) 3,692
IKM Unit pelayanan										**) 92,290

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11
- per unsur

SKM UNIT PELAYANAN : 92,29

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,480
U2	Prosedur pelayanan	3,760
U3	Waktu pelayanan	3,620
U4	Biaya / tarif pelayanan	3,960
U5	Produk Pelayanan	3,800
U6	Kompetensi petugas pelayanan	3,760
U7	Perilaku petugas pelayanan	3,780
U8	Sarana dan prasarana	3,480
U9	Penanganan pengaduan layanan	3,920

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KANTOR CAMAT BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
SEMESTER I
TAHUN 2024**

NILAI SKM

92,29

NAMA LAYANAN : ADMINISTRASI TERPADU

JUMLAH	:	50 Orang
JENIS KELAMIN	:	L= 34 Orang, P= 16 Orang
PENDIDIKAN	:	SD = 6 Orang SMP = 10 Orang SMA = 19 Orang S1 = 15 Orang

PERIODE SURVEY = JANUARI – JUNI TAHUN 2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN DARI ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**



Ranai, 15 Juli 2024
Camat,

HAMID HASNAN, S.Pd.,MA

Pembina

NIP. 19660603 200502 1 003

44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
45	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
52	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	3	4	4	3	3	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
SNilai /Unsur	203	212	200	215	214	213	213	200	211	
NRR / Unsur	3,691	3,855	3,636	3,909	3,891	3,873	3,873	3,636	3,836	
NRR tertbg/ unsur	0,406	0,424	0,400	0,430	0,428	0,426	0,426	0,400	0,422	*)
										3,762
IKM Unit pelayanan										**) 94,050

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11
- per unsur

SKM UNIT PELAYANAN : 94,05

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,691
U2	Prosedur pelayanan	3,855
U3	Waktu pelayanan	3,636
U4	Biaya / tarif pelayanan	3,909
U5	Produk Pelayanan	3,891
U6	Kompetensi petugas pelayanan	3,873
U7	Perilaku petugas pelayanan	3,873
U8	Sarana dan prasarana	3,636
U9	Penanganan pengaduan layanan	3,836

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KANTOR CAMAT BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
SEMESTER II
TAHUN 2024**

NILAI SKM
94,05

NAMA LAYANAN : ADMINISTRASI TERPADU	
JUMLAH	: 50 Orang
JENIS KELAMIN	: L= 28 Orang, P= 22 Orang
PENDIDIKAN	: SD = 5 Orang SMP = 10 Orang SMA = 25 Orang S1 = 10 Orang
PERIODE SURVEY = JULI-DESEMBER TAHUN 2024	

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN DARI ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**



Ranai, 4 Januari 2025
Plt. Camat,

HARMIDI, S.A.P.
Penata Tk. I/III/d
NIP. 1974010 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Jl. Poros Mesjid Agung, Komplek Natuna Gerbang Utara-Provinsi Kepulauan Riau
Laman kecbungtim.natunakab.go.id, Pos-el kecbungtim.natunakab.go.id

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kecamatan Bunguran Timur
Periode : Triwulan IV
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,51	3,73	106,27

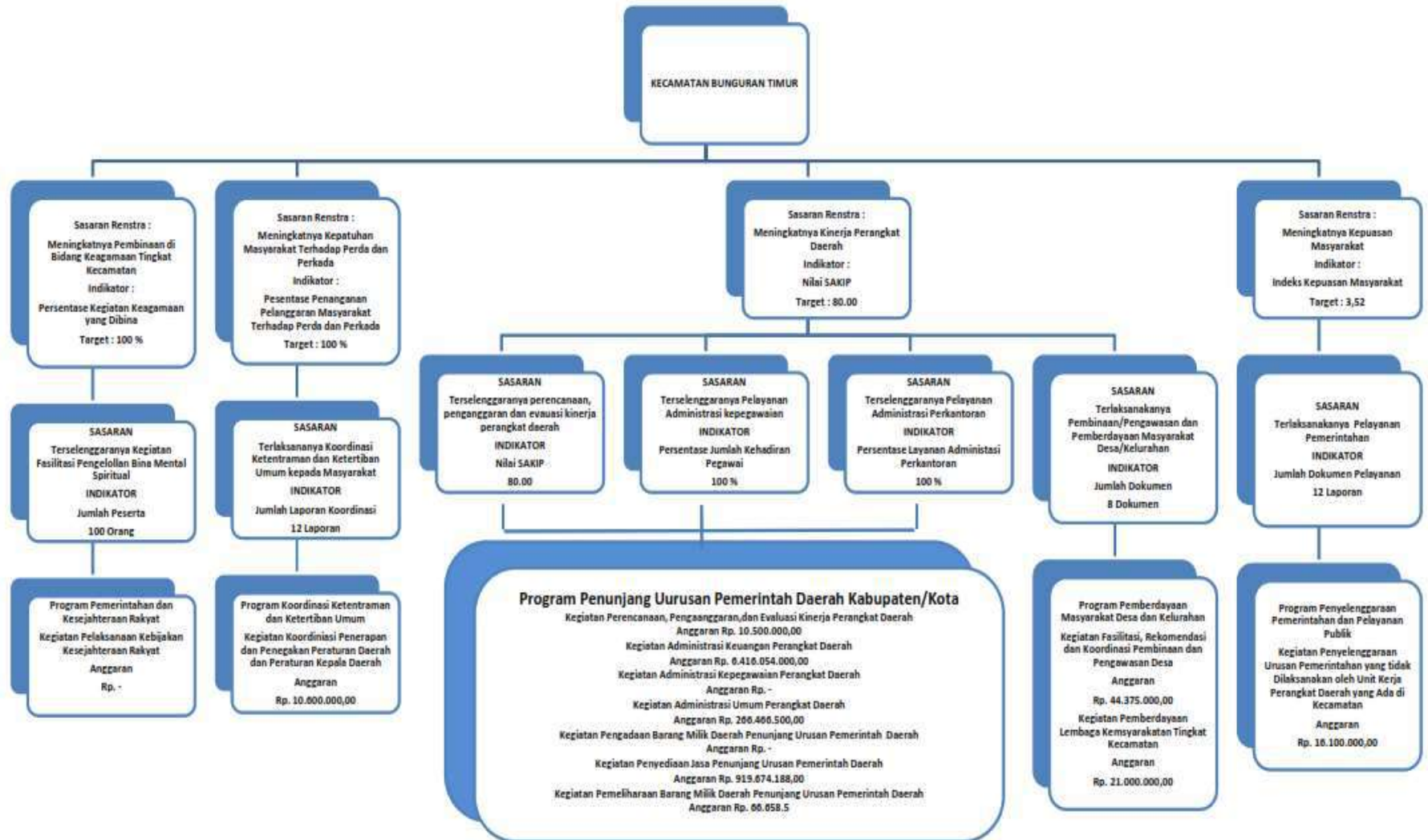
Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.646.713.792,00	Rp 8.310.633.265,00	86,15
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 219.180.000,00	Rp 206.054.336,00	94,01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3.176.125.296,00	Rp 2.666.276.349,00	84,56
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 124.066.540,00	Rp 87.566.964,00	70,56
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 43.919.550,00	Rp 31.400.600,00	71,50
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp 62.896.140,00	Rp 57.216.069,00	65,94
	Rp 13.293.001.316,00	Rp 11.379.147.605,00	85,60

Ranai, 02 Januari 2025
Plt. Camat Bunguran Timur

HARMIDI, S.A.P
NIP. 19740101 199803 1 008



CASCADING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TAHUN 2025



CROSSCUTTING KECAMATAN BUNGURAN TIMUR 2025

